

POTENSI PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Marlina

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Indonesia
Email: hafidzokol@gmail.com

Abstract: In the social system of Muslim society in Indonesia, *pesantrens* play a vital role in forming the ideal Muslim society order. *Pesantrens* and their sources also become the agent of social change because of their inclusive characteristics. The more rapid shariah economy, either as the economy system or as economics, makes sure the role of *pesantrens* because of the potencies that they have. The potencies that we can get from *pesantrens* to develop shariah economy are: (1) *pesantrens* as agents of social changing in the field of shariah economy; (2) *pesantrens* as shariah business laboratories, and (3) *pesantrens* as the centre to learn shariah economy.

Keyword: potensi pesantren; pengembangan; ekonomi syariah

A. Pendahuluan

Pesantren merupakan institusi yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem sosial masyarakat Muslim Indonesia. Peran sosial yang dimainkan oleh pesantren terus bertahan dan masih banyak memberikan warna dalam kehidupan masyarakat Muslim. Sumber daya yang dimiliki pesantren merupakan modal sosial yang sangat kuat untuk mengemban perannya sebagai lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membentuk masyarakat madani yang diidealkan oleh Islam. Semakin meluasnya praktik ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia merupakan bagian dari proses rekayasa sosial untuk mengembalikan kejayaan peradaban Islam. Melalui seperangkat sumber daya yang dimilikinya, maka pesantren pada dasarnya mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi syariah, sebagaimana yang akan dideskripsikan dalam tulisan.

B. Genealogi Pesantren

Kata *pesantren* memang sudah menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam berbagai bentuk. Pesantren pada dasarnya berasal dari kata *santri*. Kata *santri* berasal dari kata *sasthra/i* yang diambil dari Bahasa Tamil India, dan mempunyai makna orang yang pakar di bidang kitab suci. Kata *santri* kemudian diberi prefik *pe-* dan akhiran *-an*, sehingga menjadi kata *pesantren*, yang maknanya adalah peserta didik yang tinggal di pemondokan atau asrama. Nurcholish Madjid, menyebutkan bahwa pesantren mengandung makna keislaman sekaligus keaslian (*indigenous*) Indonesia. Kata "pesantren" mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid pesantren. Sedangkan kata "santri", diduga berasal dari bahasa sansekerta "*sastri*" yang berarti "melek huruf", atau dari bahasa Jawa "*santrik*" yang berarti seorang yang mengikuti gurunya kemana pun pergi.

Kata pesantren kemudian dipahami oleh masyarakat sebagai tempat pendidikan yang memberikan porsi pendidikan agama dalam porsi yang besar, dimana para peserta didik (*santri*) bermukim atau tinggal di tempat yang disediakan oleh pihak pesantren, yang kemudian disebut dengan pondok. Oleh karenanya, sangat lazim digunakan istilah "pondok pesantren" untuk menunjukkan suatu tempat dimana terdapat kegiatan pendidikan yang diikuti oleh para peserta didik yang tinggal di lokasi tempat pendidikan.

Pondok pesantren (*ponpes*) secara teknis merupakan suatu tempat yang dihuni oleh para *santri*. Hal ini menunjukkan makna penting dari ciri-ciri *ponpes* sebagai sebuah lingkungan pendidikan yang terintegrasi. Sistem pendidikan *ponpes* sebetulnya sama dengan sistem yang dipergunakan akademi militer misalnya, yakni dicirikan dengan adanya sebuah bangunan beranda, yang disitu seseorang dapat mengambil pengalaman secara integral (Wahid, et al., 2001: 13).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa kata *santri* yang berasal dari bahasa India juga menunjukkan bahwa pendidikan pesantren menurut corak dan

bentuknya yang asli adalah suatu sistem pendidikan yang berasal dari India. Sebelum masuknya Islam ke nusantara, pesantren yang ada di Indonesia adalah tempat pendidikan yang digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu dan Budha. Namun pola pendidikan pesantren semacam ini juga dapat ditemukan di beberapa kawasan Timur Tengah, seperti *an-Nidzamiyah* di Mesir; dan al-Azhar di Mesir (Steenbrink, 1994). Perdebatan mengenai asal-muasal sistem pendidikan ala pondok pesantren akhirnya menjadi kajian akademik yang terus berkembang sampai saat ini; apakah ia diadopsi dari pesantren Hindu-Budha; ataukah “diimpor” dari Timur Tengah.

Suryadi Siregar menyatakan bahwa terdapat dua versi terkait asal usul dan latar belakang berdirinya pesantren di Indonesia. *Pertama*, pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi tarekat, sehingga pesantren mempunyai kaitan yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan fakta bahwa penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat. Hal ini ditandai oleh terbentuknya kelompok organisasi tarekat yang melaksanakan amalan-amalan zikir dan wirid tertentu. Pemimpin tarekat yang disebut kyai atau *murayid* mewajibkan pengikutnya untuk melaksanakan *suluk*, selama empat puluh hari dalam satu tahun dengan cara tinggal bersama, sesama anggota tarekat dalam sebuah masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah dibawah bimbingan kyai. Untuk keperluan *suluk* ini, para kyai menyediakan ruangan khusus untuk penginapan dan tempat-tempat khusus yang terdapat di kiri dan kanan masjid. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pengajian ini tumbuh dan berkembang menjadi lembaga pesantren.

Pendapat kedua menyatakan bahwa pondok pesantren merupakan pengambil alihan dari sistem pesantren yang sudah lebih dahulu diadakan oleh orang-orang Hindu di Nusantara. Hal ini terindikasi dari catatan sejarah bahwa jauh sebelum datangnya Islam ke Indonesia, lembaga pesantren sudah ada di nusantara. Pendirian

pesantren pada masa itu dimaksudkan sebagai tempat mengajarkan agama Hindu dan tempat membina kader. Anggapan lain mempercayai bahwa pesantren bukan berasal dari tradisi Islam, alasannya adalah tidak ditemukannya lembaga pesantren di negara-negara Islam lainnya, sementara lembaga yang serupa dengan pesantren banyak ditemukan dalam masyarakat Hindu dan Budha, seperti di India, Myanmar, dan Thailand.

Seiring dengan pesatnya jumlah dan “variasi” pesantren, Soedjoko membuat lima kategorisasi pesantren menurut pola elemen dasarnya. Pola I adalah pesantren yang terdiri dari hanya masjid dan rumah kyai; Pola II adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, dan pondok. Pola III pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, dan madrasah. Pola IV terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, dan tempat keterampilan. Terakhir, pola V adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat olah raga, dan sekolah umum.

Namun demikian, menurut Dhofier (2001: 79) bahwa setidaknya terdapat lima unsur yang sudah menjadi keniscayaan untuk kemudian disebut sebagai pesantren. Kelima unsur tersebut adalah pondok (tempat tinggal), masjid, santri, kyai dan pengajaran kitab Islam klasik. Selanjutnya, santri dapat dibuat dua kategori, yaitu santri dengan sebutan ”santri kalong” dan ”santri mukim.” Santri kalong merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam pondok tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Santri kalong biasanya berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren sehingga diizinkan tidak tinggal di pondok. Adapun yang dimaksud dengan ”santri mukim” ialah santri yang ditetapkan untuk menetap di pondok pesantren karena berasal dari daerah yang jauh. Pada masa lalu, kesempatan untuk pergi dan menetap di sebuah pesantren yang jauh merupakan suatu keistimewaan dan kebanggaan bagi santri. Menurut Dhofier (2001: 89), dengan tinggal di ponpes santri disiapkan untuk memiliki cita-

cita, mampu mandiri, berani dan siap menghadapi sendiri tantangan yang akan dialaminya di pesantren.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tidak akan ada pesantren jika tidak ada kyai didalamnya. Sebagai seorang yang disegani karena memiliki ilmu agama yang tinggi, seorang kyai memelopori pendirian, pertumbuhan, perkembangan dan pengurusan sebuah pesantren. Menurut Hasbullah, sebagai pemimpin pesantren, watak dan keberhasilan pesantren banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa, serta ketrampilan kyai. Dalam konteks ini, pribadi kyai sangat menentukan sebab dia adalah tokoh sentral dalam pesantren (Hasbullah, 1999: 144).

Dalam realitas, besar kecilnya sebuah pesantren tidak lepas dari peran dan kharisma elit sentralnya yang disebut kyai. Kyai pada dasarnya merupakan konstruk sosiologis di kalangan komunitas Muslim yang banyak ditemukan di pulau Jawa. Mereka adalah sebutan lain dari ulama yang dianggap mempunyai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Secara sosiologis, mereka inilah yang menjadi tokoh penting bagi para santri, alumni, dan masyarakat luas, karena pengaruh yang sedemikian besar di hadapan mereka (Djakfar, 2010)).

Kata “kyai” yang identik dengan pemuka agama malah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Arab. Manfred Ziemek menyatakan bahwa kata ini berasal dari bahasa Jawa (Ziemek, 1986: 130). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ”kyai” yang disamakan dengan kata ”alim ulama” atau biasa disebut ”ulama” saja, yakni sebutan bagi alim ulama atau cerdik pandai di bidang ilmu agama. Juga digunakan untuk mengawali penyebutan nama benda yang dianggap bertuah seperti senjata (keris, meriam, dsb.), alat tertentu seperti alat kesenian (gamelan), alat transportasi (kereta, perahu), binatang (harimau). Sementara itu, menurut Dhofier (2001: 93) perkataan kyai dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda, yaitu sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; contohnya, “Kyai

Garuda Kencana”, gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya dan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya.

C. Pesantren dan Perubahan Sosial

Dalam perjalanannya, pesantren ternyata tidak terjebak dan berkatut dari satu kitab ke kitab. Pesantren bukan lagi menjadi tempat pendidikan *an sich*. Peran-peran sosial banyak dilakukan oleh pesantren dengan segala pola adaptasinya. Bahkan pada masa pra-kemerdekaan Indonesia, pesantren juga berperan penting di bidang politik, keamanan dan pertahanan negara. Kondisi tersebut memberikan indikator bahwa pesantren bukanlah “menara gading” yang tidak berpijak pada lingkungannya.

Berkembang lebih jauh, sosok pesantren di era modern ini tidak hanya sebagai agen pendidikan ilmu keagamaan semata, namun juga turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan (sains). Pesantren juga memiliki fungsi sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan pengkaderan ulama serta pusat perjuangan umat dalam melawan penjajah; maka pada tahun 1980-an, melalui Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dunia pesantren memperoleh tambahan fungsi baru, yaitu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Maka banyak pesantren yang kemudian dijadikan sebagai uji coba untuk program pemberdayaan masyarakat. Kita kenal beberapa pesantren, misalnya Pesantren Darul Falah Bogor, Pesantren Pabelan Magelang, Pesantren Kajen Pati, Pesantren Langitan Tuban, Pesantren An-Nuqayah Madura, dan sebagainya yang dijadikan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

Kemudian di era 2000-an, pesantren memperoleh tambahan fungsi baru lagi yaitu sebagai pusat pengembangan ekonomi kerakyatan. Maka muncullah pesantren dengan ciri khasnya mengembangkan koperasi, seperti pesantren Sidogiri

Jawa Timur. Hal ini menandai bahwa dunia pesantren sesungguhnya tidak sepi dari inovasi yang terus menerus dilakukan. Kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa dunia pesantren memiliki respon yang sangat tinggi terhadap perubahan zaman. Jadi, sesungguhnya pesantren adalah lembaga sosial dan pendidikan yang dapat menjadi pilar pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, maka pondok pesantren dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dapat dikerucutkan pada empat fungsi utama, yaitu:

1. Pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*Center of Excellence*);
2. Institusi yang mencetak sumber daya manusia (*Human Resource*);
3. Lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*Agent of Development*); dan,
4. Ponpes sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*Social Change*) (Suhartini dalam Halim et al., 2005: 233).

Terkait dengan fungsi-fungsi sosial yang diperankannya, pola pendidikan pesantren di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua model. *Pertama*, yakni salafiyah (tradisional), seperti ponpes Lirboyo Kediri, pesantren Sidogiri Pasuruan, pesantren Assirojiyah Sampang Madura, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, *kehalafiyah-ashriyah* (modern), seperti pondok Modern Gontor Ponorogo, Al-Amin Parenduan Sumenep Madura, dan masih banyak lagi.

Pada sisi yang lain, kyai dan pesantren yang dipimpinnya juga menjadi harapan terakhir kaum *nahdhiyyin* di bidang pendidikan. Menurut Dhofier (2001: 272-273), politisasi pendidikan menjadikan warga *nahdhiyyin* sebagai korban. Politisasi pendidikan sebagai akibat dari *partokrasi* pendidikan berkembang lebih marak yang mengakibatkan semakin sempitnya hak warga nahdhiyyin untuk memperoleh pendidikan yang baik. Itulah sebabnya warga *nahdhiyyin* menumpahkan harapannya kepada para kyai dan pesantren yang mampu menyelenggarakan pendidikan bagi generasi muda. Oleh karena itu, para kyai berupaya keras untuk memperbaharui

pandangan-pandangan pesantrennya. Penyegaran pemikiran ulama terdahulu atau *updating* makna kandungan kitab Islam aswaja terus berkembang. Pengembangan aktivitas dan sikap mental dalam bidang ekonomi semakin digairahkan sebagai upaya memajukan kebudayaan masyarakat.

D. Kyai dan Perubahan Sosial

Dalam setiap komunitas, dapat dipastikan terdapat kekuatan yang mampu untuk mengubah dinamika yang terjadi di komunitas tersebut. Ulama merupakan salah satu entitas yang mempunyai potensi untuk melakukan kontestasi dengan entitas yang lain untuk melakukan rekayasa sosial. Untuk suatu komunitas yang tergolong religius, kekuatan pemuka agama (ulama) menjadi sangat sentral, yang nyaris mustahil untuk dinafikan. Potensi yang dimiliki ulama terkait dengan kharisma yang dimilikinya. Kharisma, sebagaimana yang didefinisikan Weber adalah:

“...certain quality of an individual’s personality by virtue of which he is set apart from ordinary men and treated as endowed with supernatural, superhuman, or at least specifically exceptional powers or qualities.”

Barnes (1978: 1) menyatakan bahwa kharisma ibarat sebuah otoritas yang sangat tergantung kepada pengakuan sebuah kelompok masyarakat. Pengakuan ini sangat penting, karena tanpa adanya pengakuan maka seseorang tidak akan mempunyai otoritas di kelompok tersebut. Kharisma muncul juga dari kekuatan dinamis seorang tokoh dan kekuatan personalitasnya.

Hiroko Horikoshi (1987) dan Clifford Geertz (1981) memperkuat teori mengenai peran penting ulama dalam suatu komunitas melalui serangkaian studi yang mereka bangun. Istilah *cultural brokers* adalah salah satu gambaran bagaimana fungsi seorang ulama. Istilah tersebut menunjukkan fungsi mediasi yang dapat dilakukan ulama untuk mengkomunikasikan—atau bahkan memadu-padankan—antara berbagai kepentingan yang muncul di suatu komunitas. Ulama dapat berperan

sebagai "corong" suatu kepentingan dan tujuan tertentu karena kekuatan yang mereka miliki, sehingga tidak jarang ada beberapa kepentingan yang sifat *short-term* dan sangat profan yang "mendompleng" kekuatan ulama, yang sejatinya kurang sesuai dengan kapasitasnya sebagai "pewaris para nabi."

Pada sisi lain, ulama adalah sumber legitimasi keagamaan dan penggerak perubahan masyarakat. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Horikoshi (1987), ditemukan bahwa ulama adalah sumber perubahan sosial; tidak saja bagi lingkungan pesantren akan tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh studi Geertz (1981) dimana ditunjukkan bahwa pengaruh kyai/ulama terletak pada makelar kultur (*cultural brokers*). Melalui pengaruhnya sebagai *cultural brokers* tersebut, ulama secara sosial mampu menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin digunakan. Demikian halnya dalam dunia pesantren, pesantren (sebagai sebuah institusi) dan kyai memainkan peran sosial yang sangat vital. Pesantren dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga dalam tugas-tugas *social engineering*, dan sebagai lembaga dakwah Islam. Di dunia pesantren, kyai masih merupakan simbol kekuatan keilmuan dan top figur sekaligus *top leader* dalam penentuan keputusan dan kebijakan. Otoritas tersebut melekat kuat pada diri seorang kyai (Lukens-Bull, 2005: 92; Dhofier, 1994).

Dari sudut teologis, ulama juga merepresentasikan figur yang mempunyai kekuatan personal yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran teologisnya. Ulama diposisikan sebagai 'pewaris Nabi' karena kapasitas keilmuan dan pengetahuan agamanya yang luas. Tidak mengherankan jika ulama kemudian menjadi sumber legitimasi tidak saja dalam segi keagamaan, akan tetapi juga hampir pada semua aspek kehidupan (Farid, 2007).

Keberpengaruhannya ulama dan kyai tampaknya masih sangat kuat di Indonesia meskipun tantangan dari kemajuan teknologi informasi terus mengancam. Survey yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta tahun 2004 menemukan fakta bahwa hanya

12,8% saja (dari 1.880 responden) yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah berhubungan dengan ulama/kyai untuk beberapa kepentingan. Sedangkan selebihnya atau 87,2%, menyatakan bahwa mereka terkadang bahkan juga sering menemui ulama untuk memperoleh informasi dan tuntunan yang berhubungan dengan ajaran agama. Dari para responden tersebut juga diketahui bahwa mereka meminta “fatwa” dari para ulama/kyai setidaknya untuk dua kepentingan, yaitu kepentingan agama (60%), dan kepentingan sosial-politik (40%) (Zulkifli, 2010).

Dalam perspektif ekonomi, ulama dapat diposisikan dalam fungsi seorang *marketer* dalam sebuah bisnis. Dalam *spiritual marketing*, ulama menempati posisi sebagai *marketer* yang bermain pada wilayah *heart-share*. Wilayah ini mengajak calon konsumen untuk melakukan tindakan konsumsi dengan menggunakan potensi kejernihan hati yang didorong oleh sekumpulan nilai-nilai positif. Tindakan yang berbasis pada nilai-nilai positif ini akan berfungsi sebagai filter dari tindakan konsumsi yang terkontaminasi oleh polusi-polusi paradigma positivistik-materialistik. Tugas ini diemban oleh mereka yang dianggap sebagai figur yang mengawal kejernihan hati, mengawal nilai-nilai positif dan mengawal komunitas dari polusi-polusi negatif; dan mereka itu adalah para ulama.

Selain sebagai *cultural broker* dan *marketer*, peran ulama juga dapat sebagai kelompok acuan atau *reference group*. Ulama diposisikan sebagai figur panutan dan menjadi rujukan bagi suatu komunitas dalam menentukan sikap dan perilaku mereka. Tidak sedikit keputusan suatu komunitas yang menunggu dan menggunakan sikap ulama sebagai konsideran. Dalam posisinya sebagai kelompok acuan inilah, ulama dapat memengaruhi komunitasnya untuk melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu. Dengan digunakannya sebagai sandaran komunitas, secara kultural ulama mempunyai kekuatan dan peran dalam menentukan dinamika suatu kelompok.

Reference group adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai perbandingan dan acuan bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai umum atau

khusus dalam berperilaku. Dari perspektif pemasaran, *reference group* merupakan kelompok yang dianggap sebagai dasar referensi bagi seseorang dalam menentukan keputusan pembelian atau konsumsi mereka. Dilihat dari keberpengaruhannya ulama dalam kapasitasnya sebagai *reference group*, maka *playing field* pengaruh tersebut dapat masuk melalui tiga jalur pengaruh, yaitu pengaruh normatif, pengaruh ekspresi nilai, dan pengaruh informasi.

Ada beberapa hal yang menjadikan ulama sebagai kelompok acuan sehingga berperan penting dalam membangun komunitas. *Pertama*, karena informasi dan pengalaman. Ulama merupakan figur yang mempunyai (atau dianggap mempunyai) informasi lebih dalam mengenai suatu hal, dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah. Sesuatu yang "berbau" syariah adalah wilayah agama, dan yang paling berkompeten di wilayah agama adalah para ulama. *Kedua*, karena kredibilitas dan daya tarik. Ulama adalah magnet yang mampu menarik perhatian komunitasnya. Ulama juga diposisikan sebagai individu yang kredibel karena "kesuciannya." Maka menjadi sangat logis jika kemudian ia menjadi kelompok acuan dan mampu memengaruhi sikap masyarakat.

Terkait dengan hal ini, Handi Irawan ketika menyebutkan beberapa ciri khas konsumen Indonesia, ia menyebutkan bahwa konsumen Indonesia banyak dipengaruhi oleh pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal tersebut adalah dalam hal *group reference*. Ini adalah bagian yang sungguh-sungguh tidak dapat dibandingkan dengan masyarakat Amerika. Dalam konteks ini, pengaruh para *opinion leader* sungguh besar. Untuk suku Jawa, Madura atau Sunda, ulama memiliki peran yang sangat besar terhadap masyarakat untuk menentukan pilihan mereka untuk produk-produk tertentu. Mereka menjadi panutan bagi masyarakat dalam memfilter informasi. Saran dan keteladanan mereka menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam membuat evaluasi terhadap pembelian suatu produk. Demikian pula, untuk beberapa suku dimana tradisi adatnya masih kuat seperti suku Bali, para pemimpin adat ini jugalah

yang menjadi *opinion leader*. Mudah dipahami apabila kemudian banyak perusahaan telekomunikasi, perbankan, makanan dan minuman yang kemudian mendukung kegiatan dari para ulama ini. Tujuannya adalah untuk merebut simpati mereka dan secara tidak langsung, kalau para ulama menyarankan untuk membeli merek X, sekitar 30% hingga 50% dari pengikutnya, akan dengan segera memilih merek produk yang sama.

E. Pesantren dan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah, baik sebagai sistem ekonomi maupun sebagai ilmu ekonomi (*economics*) lahir dari rahim para intelektual Muslim. Ekonomi syariah yang lahir dan berkembang dengan berbagai latar belakang dan kepentingan pada dasarnya bertujuan untuk “mensyariahkan” umat, sehingga umat semakin mendekati derajat sebagai Muslim yang sempurna (*kaffah*). Upaya “mensyariahkan” umat (tidak terkecuali mensyariahkan di bidang ekonomi) menjadi tugas setiap komponen masyarakat dan institusi-institusi keislaman lainnya.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pesantren mempunyai peran sebagai agen perubahan sosial. Terkait dengan peran pesantren dan mensyariahkan ekonomi umat, maka dapat diuraikan deskripsi berikut ini.

1. Agen Perubahan Sosial di Bidang Ekonomi Syariah

Kyai selain merupakan salah satu unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren, juga berada pada posisi sentral dalam komunitas pesantren, karena ia dianggap sebagai pemilik, pengelola, pengajar kitab kuning sekaligus sebagai imam (pemimpin). Ini berarti bahwa tradisi keagamaan pesantren yang berkembang dalam komunitas itu telah mampu membangun sub budayanya sendiri, yang cenderung terkesan tertutup dan eksklusif. Padahal pesantren merupakan bagian integral dari kultur masyarakat sekitarnya termasuk sistem pendidikan yang berlaku di dalamnya.

Dalam perkembangannya, dengan sifat eksklusif seperti itu, muncul benturan dahsyat dari sistem pendidikan umum yang mengenainya, sehingga ia tak lagi mampu mengelak. Karena itu tidaklah mengherankan bila benturan itu mengakibatkan eksistensi pondok pesantren menjadi terkontaminasi. Begitu pula posisi kyai, bergeser dari titik sentral. Kharisma dan kekuasaan kyai pudar oleh perkembangan rasionalitas masyarakat yang luar biasa (Sukamto, 1999).

Di tengah arus globalisasi di seluruh dimensi kehidupan manusia, himpitan dan tekanan ekonomi menjadi salah satu akar penyebab terjadinya disorientasi manusia Muslim. Lingkungan yang kian kapitalistik, materialistik dan hedonis seolah memberikan legitimisasi untuk bersikap permisif terhadap segala sesuatu meskipun mendistorsi ajaran agama. Pranata sosial seolah tercerabut oleh kepentingan-kepentingan ekonomi jangka pendek.

Kondisi semacam ini pada dasarnya membuat manusia modern menjadi “lelah”, tertekan dan kehilangan referensi karena tuntutan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang pada dasarnya untuk memenuhi hajat hidup manusia, justru bergeser menjadi aktivitas untuk mengejar dan memuaskan selera dan bahkan keinginan (*satisfying wants*). Namun karena nafsu dan keinginan tak pernah mengenal batas, maka manusia pun tak pernah berhenti untuk mengejarnya. Inilah yang membuat manusia menjadi “lelah.”

Merujuk pada kondisi inilah, pesantren pada posisi untuk melakukan perubahan sosial. Mengubah orientasi ekonomi masyarakat yang semula bertujuan untuk memuaskan keinginan, menjadi “cukup” dengan memenuhi kebutuhan. Mengubah gaya hidup yang konsumeris, menjadi pola hidup yang moderat. Membingkai aktivitas ekonomi manusia modern dalam kerangka *ta’abbudi* (ibadah) yang semula hanya sebatas dalam bingkai memuaskan kebutuhan jasmani. Mengubah orientasi *profit-oriented* dan *utility*, menjadi orientasi *maximizing maslahah*.

“Senjata” yang dapat digunakan oleh kalangan pesantren untuk melakukan perubahan sosial tersebut adalah ilmu ekonomi syariah, karena ekonomi syariah pada dasarnya disusun agar manusia Muslim semakin mendekati derajat ketaqwaan, khususnya di bidang ekonomi. Pesantren memang mempunyai banyak referensi dan pilihan dalam menghalau efek negatif gelombang modernitas. Namun untuk penyakit *social-disorder* yang berakar dari persoalan ekonomi, maka ekonomi syariah menjadi pilihan referensi tepat bagi kalangan pesantren.

Pesantren dengan kyai yang melekat didalamnya, masih memainkan peran sosial yang sangat besar bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Meskipun teknologi informasi dan modernisasi terus mendera dinamika kehidupan individu Muslim, namun kyai dan pesantren tetap menjadi tembok kokoh yang membentengi masyarakat dari penyakit-penyakit yang muncul dari budaya-budaya modern. Peran dan potensi di bidang sosial inilah yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi syariah yang dimotori oleh kalangan pesantren. Mengembangkan ekonomi syariah merupakan bagian dari rekayasa sosial agar tercipta masyarakat yang ideal menurut Islam yang selama ini diupayakan oleh pesantren.

2. Laboratorium Bisnis Ekonomi Syariah

Pesantren merupakan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Peran ini juga sangat strategis, mengingat masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil tentu hal itu akan diikuti oleh masyarakat. Sebaliknya, jika pesantren pasif dan apatis tentu berpengaruh kepada masyarakat, apalagi jika mereka masih berinteraksi dengan ekonomi konvensional.

Selain itu, pesantren juga berperan sebagai lembaga produksi dan konsumsi. Pesantren sebagai lembaga produksi yang ditunjukkan dengan adanya

penguasaan terhadap tanah yang luas, memiliki tenaga kerja dan teknologi yang sangat diperlukan untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan, menunjukkan bahwa pesantren dapat berperan sebagai produsen yang mensuplai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika sebuah pesantren bergerak dalam bidang pertanian, maka pesantren ini merupakan produsen dalam bidang pertanian, jika pesantren bergerak dalam bidang industri (kerajinan, kecil) maka pesantren sebagai produsen dalam bidang industri (2013).

Sebagai sebuah “negara kecil” dengan kyai sebagai “presidennya” dan para santri sebagai “rakyatnya,” maka sangat memungkinkan bagi pesantren untuk mengimplementasikan bisnis syariah karena adanya otoritas yang dimiliki oleh pimpinan pesantren. Jumlah santri yang banyak di dalam pesantren, pada satu sisi merupakan pasar tersendiri yang sangat potensial yang memungkinkan pesantren untuk membuka bisnis. Adanya otoritas dan pasar inilah maka pesantren sangat mungkin menjadi laboratorium praktik bisnis syariah, meskipun pada skala yang kecil. Dalam pengertian lain, pesantren mempunyai sumber daya yang sangat potensial untuk mempraktikkan bisnis syariah.

Pada sisi yang lain, pesantren juga dituntut kemandiriannya dari sisi ekonomi dan finansial. Dependensi pesantren secara finansial kepada pihak luar baik yang berupa kekuatan politik, birokrasi maupun kekuatan yang lain akan menggerus kemandirian pesantren. Pesantren akan lebih mudah terkooptasi dengan kepentingan tertentu jika menggantungkan kemampuan finansialnya kepada pihak lain. Oleh karenanya menjadi penting bagi pesantren untuk mempunyai unit usaha dan bisnis yang dapat menjadi sumber pemasukan bagi pesantren. Pada posisi ini, tentu unit bisnis syariah yang terbebas dari MAHGRIIB (maysir, gharar, riba, risywah dan bathil) harus menjadi pilihan utama kalangan pesantren.

3. Pesantren sebagai Pusat Belajar Ekonomi Syariah

Sudah menjadi keniscayaan bahwa pesantren adalah rahim dari embrio intelektual Muslim di Indonesia. Pesantren, ibarat penyedia cendekiawan Muslim di Indonesia yang sangat signifikan. Melalui “spesialisasi” dan keunikan yang dimiliki oleh pesantren, maka sangat besar potensi yang dimiliki oleh pesantren untuk melahirkan para ekonom Muslim yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terlebih lagi, jika menilik pada genealogi ilmu ekonomi syariah yang justru lebih dulu berkembang di luar pesantren. Ilmu ekonomi syariah lahir dari rahim intelektual Muslim kampus, akademisi dan sebagian pengusaha. Umumnya, penguasaan mereka terhadap ilmu-ilmu kesyariahan, *turats*, kitab-kitab kuning klasik, maupun *muamalat maliyah* masih di belakang dari mereka yang lahir dari dunia pesantren.

Ekonomi syariah membutuhkan Sumber Daya Manusia/Insani (SDM/I) yang mendalami *fiqih muamalah*, *qawaid fiqhiyyah*, *qawaid ushuliyah*, dan sejenisnya untuk terhindar dari perilaku distortif terhadap syariah. Salah satu problem ekonomi syariah saat ini adalah bahwa ia dikembangkan oleh kalangan yang belum sempurna pemahamannya dengan tradisi dan istilah kunci dalam bahasa Arab yang melekat dalam fiqih muamalah, yang berisiko pada rapuhnya penguasaan teoritis. Padahal ekonomi syariah baik sebagai sebuah sistem ekonomi maupun sebagai ilmu ekonomi, tidak dapat dipisahkan dari khazanah keilmuan Islam yang telah diletakkan sebelumnya oleh para cendekiawan muslim.

Pesantren sangat berpotensi untuk berperan dalam pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan da'i yang diakui masyarakat. Ulama produk pesantren sangat berpotensi menjadi ulama ekonomi Islam yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan

program LKS tersebut sesuai dengan syariah. Disamping itu, mereka juga dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat, karena mereka adalah panutan dan suara mereka lebih didengar daripada ulama dan da'i produk lembaga non-pesantren. Kelebihan lainnya, mereka lebih menguasai fiqih muamalah, sehingga memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi syari'ah kepada masyarakat dengan lebih baik.

Pada sisi lain, dunia pesantren juga membutuhkan optimalisasi pendidikan mereka di bidang ekonomi syariah. Hal ini perlu dilakukan agar pendidikan pesantren tetap eksis, *up-to-date*, dan mempunyai kekuatan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pesantren perlu mengembangkan sistem pendidikannya, termasuk metodologi pengajaran dan muatan kurikulum, salah satunya dengan mengakomodasi muatan fiqih muamalah *ashriyyah* yang lebih mengarah pada aktivitas ekonomi kontemporer (Syakur, 2009).

F. Penutup

Dengan sumber daya yang dimiliki pesantren sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat Muslim di Indonesia, maka pesantren sangat berpotensi untuk memainkan perannya dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Potensi yang dimiliki oleh pesantren untuk mengembangkan ekonomi syariah setidaknya dalam tiga hal, yaitu (1) pesantren sebagai agen perubahan sosial di bidang ekonomi syariah; (2) pesantren sebagai laboratorium bisnis syariah; dan (3) pesantren sebagai pusat belajar ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

- Barnes, Douglas F. "Charisma and Religious Leadership: An Historical Analysis" dalam *Journal of the Scientific Study of Religion*, Vol.1., tahun 1978.
- Clifford, Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994.

- Djakfar, Muhammad, "Prospek Perbankan Syariah: Studi Pandangan Elite Pesantren Salafiyah Perkotaan di Sampang Madura," dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 13, No. 1, Januari 2010.
- Faridl, Miftah, "Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia" dalam *Jurnal Sosioteknologi*, ed. 11, tahun 6, Agustus 2007.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Hiroko, Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Lukens-Bull, Ronald, *Peaceful Ijtihad: Negotiating Identity and Modernity in Moslem Java* (New York: Palgrave Mcmillian, 2005).
- Rasyid, Hamdan, "Peran Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", dalam www.febi.unair.ac.id, diakses 21 Juli 2013.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Suhartini, Rr, "Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren", dalam A. Halim et al., *Manajemen Pondok Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*, Jakarta: Pustaka LP3S, 1999.
- Syakur, Ahmad "Optimalisasi Peran Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", dalam jurnal IQTISHODUNA, Vol. 5, No. 3, Thn. 2009.
- Syakur, Ahmad, "Optimalisasi Peran Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", dalam jurnal IQTISHODUNA, Vol. 5, No. 3, Thn. 2009.
- Wahid, Marzuki et al., *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 2001.
- Ziemek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1986..
- Zulkifli, "The Ulama, Religious Authority and Recognition in Indonesia," paper dalam *Annual Conference on Islamic Studies*, Banjarmasin, November 2010.